

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Nama Mahasiswa : Eka Prasti Candra Febriyanti

NIM : 2101036034

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

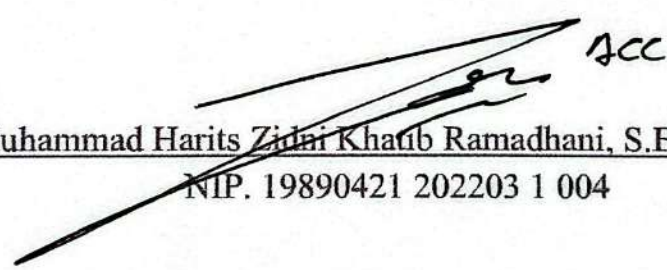
Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Ujian Skripsi/Pendadaran

Menyetujui,

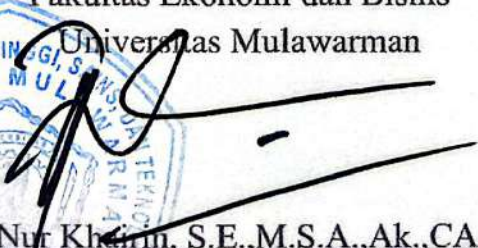
Samarinda, 8 Desember 2025

Pembimbing,

 SCC
Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani, S.E., Ak., M.Si
NIP. 19890421 202203 1 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman


Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIOaR
NIP. 19850204 200912 2 007

Admin Perpustakaan

251201113652 Eka Prasti Candra Febriyanti - 2101036034
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Informasi A...

 Perpustakaan

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:123324086

Submission Date

Dec 1, 2025, 3:17 PM GMT+8

Download Date

Dec 1, 2025, 3:21 PM GMT+8

File Name

Eka Prasti Candra Febriyanti (2101036034) - Eka Prastii.docx

File Size

162.4 KB

PERPUSTAKAAN
FEB UNMUL

46 Pages

8,249 Words

57,310 Characters

11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Small Matches (less than 17 words)

Top Sources

- 8% Internet sources
- 3% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review



Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

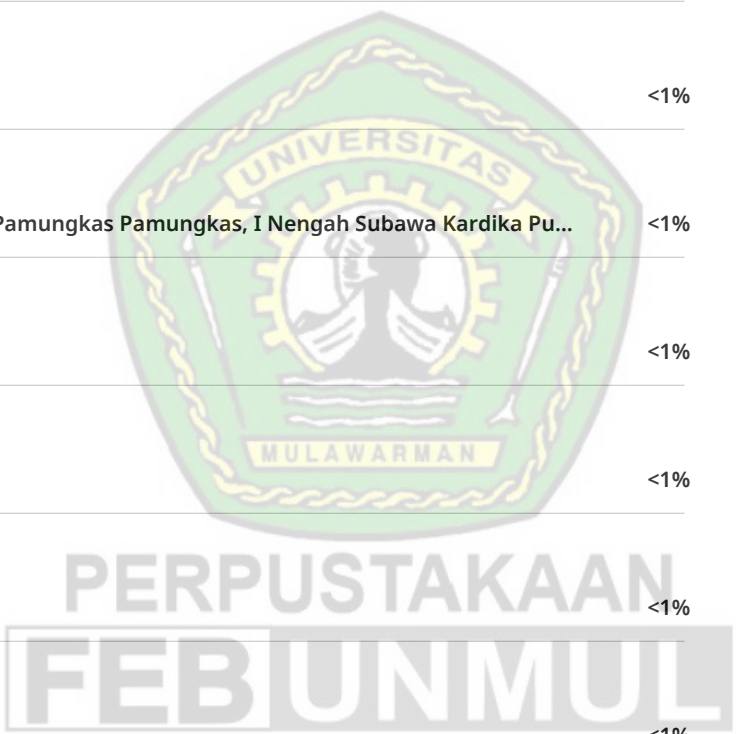
Top Sources

- 8% Internet sources
- 3% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

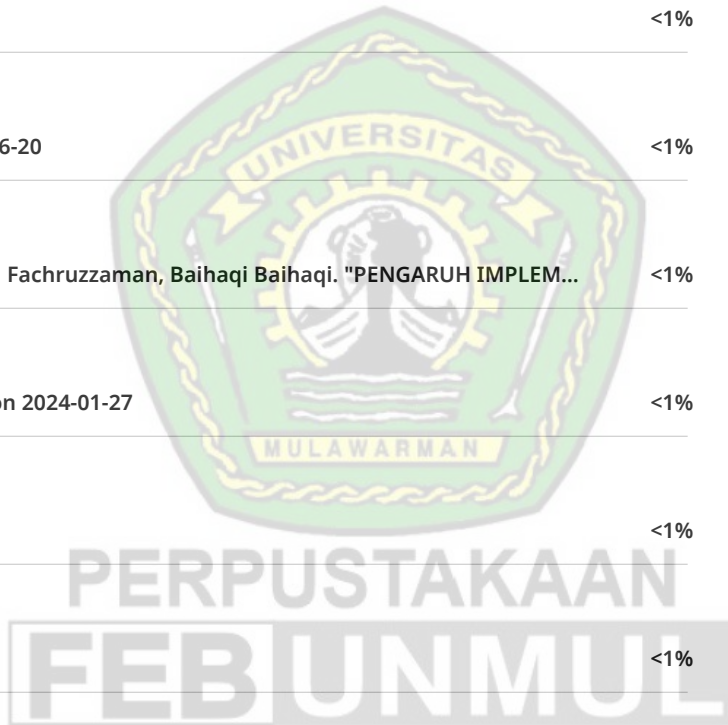
Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejurnal.stie-trianandra.ac.id	<1%
2	Internet	eksis.unbari.ac.id	<1%
3	Publication	I Gusti Ayu Ketut Giantari, Pamungkas Pamungkas, I Nengah Subawa Kardika Pu...	<1%
4	Internet	riset.unisma.ac.id	<1%
5	Internet	journal.stieamkop.ac.id	<1%
6	Internet	text-id.123dok.com	<1%
7	Internet	paserkab.go.id	<1%
8	Internet	jim.unisma.ac.id	<1%
9	Student papers	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada on 2023-11-02	<1%
10	Student papers	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah on 2025-10-20	<1%
11	Publication	Padilah Padilah, Sri Rahayu, Yudi Yudi. "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARA...	<1%



12	Internet	ejournal.undiksha.ac.id	<1%
13	Student papers	iGroup on 2018-12-21	<1%
14	Publication	Pranashinta Intan Berlianna, Muhammad Faisal Yul Zamrudi. "Peningkatan Kiner...	<1%
15	Internet	repository.unsada.ac.id	<1%
16	Student papers	IAIN Purwokerto on 2025-06-20	<1%
17	Publication	Meta Herlia, Fachruzzaman Fachruzzaman, Baihaqi Baihaqi. "PENGARUH IMPLEM...	<1%
18	Student papers	Universitas Putera Batam on 2024-01-27	<1%
19	Internet	repository.fe.unj.ac.id	<1%
20	Internet	repository.uhamka.ac.id	<1%
21	Student papers	Universitas Papua on 2023-06-19	<1%
22	Internet	core.ac.uk	<1%
23	Internet	www.researchgate.net	<1%
24	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-07-04	<1%
25	Student papers	Universitas Riau on 2023-01-30	<1%



26	Internet	repository.univ-tridinanti.ac.id	<1%
27	Student papers	Brandeis High School on 2015-03-05	<1%
28	Student papers	Universitas Bengkulu on 2023-07-12	<1%
29	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2012-08-03	<1%
30	Student papers	Universitas Papua on 2022-02-16	<1%
31	Student papers	Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia on 2024-11-05	<1%
32	Publication	Nita Cahyaningsih, Rukmini, M. Hasan Ma'ruf. "Pengaruh Pengawasan, Akuntabi...	<1%
33	Student papers	Universitas Papua on 2022-10-11	<1%
34	Internet	adoc.pub	<1%



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat era globalisasi ini, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Tuntutan terhadap kinerja yang optimal semakin menguat seiring penerapan otonomi daerah serta berbagai regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan (Bharata, 2015).

Kinerja instansi pemerintah dalam sektor publik mencerminkan tingkat pencapaian tujuan organisasi, sebagai turunan dari visi, misi, serta strategi yang telah dirumuskan. Hal ini menjelaskan seberapa baik atau buruk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Wijaya, 2019). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai sejauh mana target organisasi telah dicapai.

Instansi pemerintah daerah tampaknya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait rendahnya optimalisasi kinerja dalam penyediaan layanan publik dan pengelolaan anggaran. Kinerja pemerintah dianggap baik apabila mampu mencapai hasil yang signifikan dan terealisasi secara optimal (Rahmadani & Narastri, 2024). Untuk menilai keberhasilan tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis guna mengetahui apakah program kerja telah dijalankan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemampuan mengelola keuangan daerah oleh pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kapasitas ini mencakup kemampuan mendanai pembangunan, memaksimalkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian fiskal. Jumlah PAD yang semakin besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu menjalankan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. PAD didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari potensi lokal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Konsolidasi) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	% 2024
Pajak Daerah	80.289.000.000,00	54.941.477.344,00	68,43
Retribusi Daerah	178.793.651.781,00	12.057.427.102,60	6,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.566.160.518,00	6.566.160.518,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	34.883.651.945,00	180.556.174.701,29	517,60
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300.532.464.244,00	254.121.239.665,90	84,56

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025

Tabel Realisasi APBD Kabupaten Paser Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah hanya mencapai 68,43% dan retribusi daerah 6,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Paser masih belum optimal karena capaian realisasi pendapatan jauh dibawah target yang ditetapkan.

Pada konteks tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjamin pemanfaatan anggaran publik yang tepat dan bertanggung jawab. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses, relevan, lengkap, dan tepat waktu, baik terkait kebijakan, anggaran, maupun kinerja pemerintah.

Suatu organisasi juga dalam usahanya mencapai keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya, biasanya menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan organisasi. Memiliki sistem informasi akuntansi yang tepat dan berkualitas akan mempengaruhi kinerja pegawai untuk menghasilkan informasi keuangan yang juga akan berdampak pada kinerja organisasi. Kemajuan teknologi memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat, sehingga membantu instansi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengawasan program kerja.

Beberapa penelitian terdahulu yang sehubungan dengan judul penelitian ini memberikan hasil yang beragam. Pengaruh pertama yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah akuntabilitas. Menurut Sufiati *et al.* (2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota Makassar. Namun hasil penelitian oleh Jitmau *et al.* (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong.

Berikutnya pengaruh kedua yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah transparansi. Menurut Sufiati *et al.* (2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota Makassar. Sedangkan hasil penelitian lainnya oleh Haris *et al.* (2022) yang membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Selanjutnya pengaruh ketiga yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah sistem informasi akuntansi. Penelitian oleh Azizah & Hidayat (2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Sedangkan penelitian lain menunjukkan jawaban berbeda, yaitu penelitian oleh Likuwatan *et al.* (2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan pada instansi pemerintah Kota Batu.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut. Selain itu, urgensi penelitian juga terlihat dari kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang belum mengoptimalkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Ketidakmaksimalan pendapatan berpotensi menghambat pencapaian target pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

27 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk menguji kembali hasil penelitian sebelumnya dan mengetahui lebih lanjut terkait kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan dengan sistem informasi akuntansi yang mendukung dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.

27

10

11

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan tentang masalah yang dibahas. Serta diharapkan akan mendorong studi lebih lanjut mengenai akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah.
 - b) Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dan bahan literasi untuk dijadikan sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang juga meneliti terkait dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser”.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terkait pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi untuk mengukur kinerja organisasi. Serta bisa juga sebagai sarana untuk pengambilan keputusan, dan dengan demikian pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemimpin atau manajer dalam suatu organisasi berperan sebagai pengelola (*steward*) yang bertindak untuk kepentingan publik dan organisasi, bukan untuk keuntungan pribadi. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) mereka berasumsi bahwa seorang *steward* memiliki orientasi pelayanan dengan tujuan utama memenuhi kepentingan terbaik pemilik organisasi atau masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya hubungan berbasis kepercayaan antara pemimpin dan pemilik sumber daya, dimana keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen *steward* dalam melindungi dan memaksimalkan nilai organisasi melalui kinerja yang optimal.

Dalam teori *stewardship*, pemerintah berperan sebagai *steward* yang mengelola sumber daya, sedangkan masyarakat bertindak sebagai *principal* atau pihak yang memberikan mandat. Pada konteks pemerintahan daerah, pejabat publik berkewajiban mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Teori ini mendasari bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat yang mampu meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, karena keduanya memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai pihak yang menerima amanah, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada rakyat (Jatmiko, 2020). Selain itu, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang andal dapat

membantu pemerintah mengelola informasi keuangan secara lebih efektif, akurat, dan tepat waktu.

Dalam konteks sektor publik, teori *stewardship* relevan karena selaras dengan tujuan utama organisasi pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara akuntabel. Implikasinya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Paser seharusnya bertindak sebagai steward yang bekerja berdasarkan mandat kepentingan publik. Peran ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti karakteristik layanan yang diberikan, kapasitas manajemen publik, bentuk insentif serta sanksi, dan kebutuhan informasi yang diperlukan.

Sebagai *steward*, para pengelola anggaran diharapkan mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan *principal*, yakni masyarakat. OPD sebagai pelaksana pemerintahan perlu menunjukkan kepercayaan publik melalui kinerja yang sesuai tugas dan fungsinya, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Melalui kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi SIA yang memadai, pengelolaan anggaran diharapkan dapat lebih optimal.

2.1.2. Akuntabilitas

Secara harfiah, akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *accountability* yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkannya kepada pihak yang memiliki kepentingan atas segala aktivitas kegiatan dan kinerja yang telah dilakukan. Sufiati *et al.* (2022) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban individu atau

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, administrasi, serta penerapan kebijakan sesuai mandat yang diberikan. Mardiasmo (2018) mengungkapkan akuntabilitas berarti kewajiban pihak yang diberi amanah untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memberikan amanah tersebut.

2.1.3. Transparansi

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan kepada masyarakat. Informasi tersebut harus tersedia secara memadai agar publik dapat memahami, menilai, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Haris *et al.*, (2022) mendefinisikan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Kiri & Handayani, (2021), transparansi bertujuan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat, terutama terkait isu-isu publik serta mekanisme akses informasi. Dengan transparansi, peluang penyimpangan seperti korupsi, penipuan, dan pelanggaran lainnya dapat diminimalisasi karena proses serta hasil kerja pemerintah dapat diketahui secara lebih jelas.

2.1.4. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah rangkaian prosedur yang dirancang untuk menghimpun, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan bagi pengambil keputusan. Zahro (2016) menjelaskan bahwa SIA terdiri dari berbagai sumber daya, termasuk tenaga kerja dan perangkat pendukung, yang bertujuan

mengubah data menjadi informasi yang berguna. Informasi yang dihasilkan SIA digunakan oleh pihak-pihak dalam organisasi untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja.

2.1.5. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

16 Kinerja adalah ringkasan tentang seberapa baik suatu program, kegiatan, atau kebijakan berhasil dicapai untuk mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Hal ini dituangkan melalui perencanaan strategis yang dibuat oleh organisasi tersebut (Moehoriono, 2012). Kinerja adalah hasil dari pekerjaan individu atau kelompok yang diselesaikan dalam sebuah organisasi sesuai otoritas dan tanggung jawab mereka dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan organisasi (Sinambela, 2016). Konsep yang sering digunakan untuk melihat kinerja instansi pemerintah daerah adalah berkaitan dengan penggunaan anggaran. 23 Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan kinerja diartikan sebagai hasil atau keluaran dari suatu kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai dalam rangka pemanfaatan anggaran, dan hasil tersebut diukur berdasarkan aspek kuantitas dan kualitas.

Penilaian berdasarkan berbagai indikator kinerja, seperti indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, menghasilkan pengukuran (Audyta *et al.*, 2021). Pengukuran kinerja ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu inisiatif berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi lembaga pemerintah. Pengukuran kinerja di sektor publik sangat penting karena pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas hasil kerjanya. Audyta *et al.*, (2021) mengklaim bahwa

penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program atau kegiatan. Namun, tergantung pada fitur layanan yang ditawarkan, indikasi dari setiap unit organisasi dapat bervariasi. Sejumlah pertimbangan komponen diperlukan saat menentukan indikator kinerja, termasuk yang berikut: 1) biaya layanan; 2) konsumsi; 3) standar dan kualitas layanan; 4) cakupan layanan; dan 5) kepuasan pelanggan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi atau sumber acuan yang dapat membantu peneliti untuk memperluas serta mendalami penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan tabel penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang terkait:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Rahmadani & Narastri, 2024) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi Y: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Teknik sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> dengan kriteria inklusi yaitu Minimal 3-5 tahun bekerja di divisi tersebut; Memahami tema penelitian; dan Memahami deskripsi pekerjaan.	Hasil penelitian ini baik secara simultan dan parsial Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya.

Disambung ke halaman berikutnya

6

Tabel 2.1. Sambungan

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
2	(Azizah & Hidayat, 2023) Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Sistem Pengendalian Intern X ₃ : Sistem Informasi Akuntansi Y: Kinerja Organisasi	Pengambilan sampel dengan menjumlahkan responden yang bersedia mengisi kuesioner serta kriteria yang dilihat adalah tingkat pendidikan dan menjabat minimal satu tahun di jabatan yang sama karena sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan, yang terdiri atas tiga bidang yaitu Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi. Teknik penentuan sampel menggunakan <i>nonprobability sampling</i> berupa <i>purposive sampling</i> .	1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi. 2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. 3. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.
3	(Likuwatan <i>et al.</i> , 2023) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintahan (Studi Kasus pada Instansi Pemerintah Kota Batu)	X ₁ : Sistem Informasi Akuntansi X ₂ : Sistem Pengendalian Internal Y: Kinerja Pemerintahan	Menggunakan <i>purposive sampling</i> sebagai teknik pengambilan sampel yang sampelnya berjumlah 49 pegawai Pemerintah Kota Batu yang memiliki kriteria sebagai pegawai yang bekerja pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Instansi Pemerintah Kota Batu.	1. Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.
4	Ana <i>et al.</i> , (2022) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintahan (Studi Kasus pada Desa yang Terdapat pada Kecamatan Donomulyo)	X ₁ : Sistem Informasi Akuntansi X ₂ : Sistem Pengendalian Internal Y: Kinerja Pemerintahan	Sampel ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dengan beberapa kriteria tertentu, yaitu: 1. Semua staff perangkat desa masing-masing desa yang ada di Kecamatan Donomulyo yang masih aktif. 2. Menggunakan sistem informasi akuntansi dan melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.	Hasil dari penelitian ini Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh pada Kinerja Pemerintahan. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan pada desa yang terdapat pada Kecamatan Donomulyo.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
5	(Haris <i>et al.</i> , 2022) Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi X ₃ : Sistem Pengendalian Intern Y: Kinerja Pemerintah Daerah	Sampelnya adalah kepala dinas OPD di Provinsi Jambi yang terdiri dari 19 dinas. Responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dinas OPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, dan Bendahara OPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh.	1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
6	(Sufiati <i>et al.</i> , 2022) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi Y: Kinerja Instansi	Sampel hanya 3 OPD dan setiap OPD ada 10 responden sehingga total responden sebesar 30. Responden dari 3 OPD tersebut adalah Para Pejabat/Aparatur (Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kasubag Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kasubag Pemanfaatan Data dan Pelayanan, Kasubag Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Kasubag Pelayanan Pendaftaran Penduduk).	1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi. 2. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi.

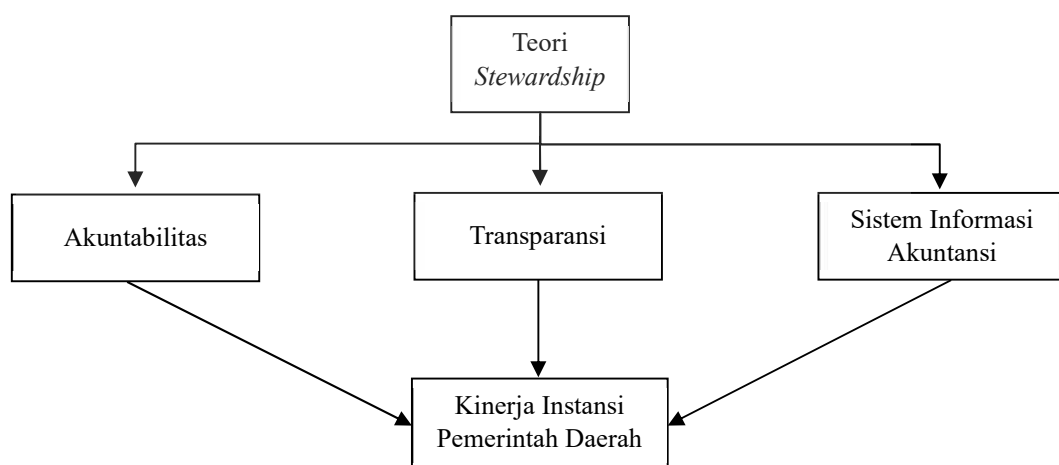
Sumber: penelitian terdahulu (Data Olahan, 2025)

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat untuk menjelaskan keterkaitan antara konsep utama dengan konsep mengenai masalah yang berasal dari konsep teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Teori *stewardship* menjelaskan keterkaitan

hubungan dua pihak antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah (*steward*). Implikasi teori *stewardship* ini menggambarkan eksistensi pemerintahan. Pemerintah tentu dipercaya agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar untuk kepentingan publik. Dengan demikian, hal tersebut bertujuan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah daerah.

Upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah, akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan. Akuntabilitas dilakukan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Transparansi pun dilakukan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah. Begitu juga sistem informasi akuntansi yang digunakan pemerintah akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah dalam bentuk ketepatan informasi yang disampaikan secara akurat. Maka, kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan hubungan teori *stewardship* dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Olahan, 2025

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Teori *stewardship* mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus bertanggung jawab atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, dengan pemerintah bertindak sebagai pengurus (pelayan) dan rakyat sebagai prinsipal (yang dilayani). Akuntabilitas didefinisikan sebagai mengambil tanggung jawab atas tercapainya atau kegagalan dalam menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban organisasi pemerintah untuk menggunakan dana publik dengan cara yang hemat, efektif, dan bebas dari korupsi, pemborosan, dan kebocoran. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas mencakup tanggung jawab pengelolaan anggaran, kinerja program, dan pencapaian tujuan yang strategis. Akuntabilitas yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sufiati *et al.* (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota Makassar. Di lembaga pemerintahan, akuntabilitas sangat penting karena meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Transparansi dalam urusan publik mempermudah pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Pengawasan publik berperan sebagai pencegah penyalahgunaan sumber daya dan pelanggaran lainnya seperti korupsi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas secara signifikan meningkatkan kinerja

pemerintah daerah, yang sesuai penelitian sebelumnya oleh Jatmiko (2020). Hal ini ditunjukkan oleh hubungan erat antara program dan kebijakan dengan pencapaian kinerja; kebutuhan bagi semua pejabat dan pemimpin untuk memahami tujuan anggaran suatu program; dan perlunya menetapkan visi dan misi program sesuai dengan rencana strategis organisasi. Akibatnya, hipotesis pertama menyimpulkan bahwa :

H₁: Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.

2.4.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Menurut teori *stewardship*, transparansi mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, yang menghasilkan pada peningkatan kepercayaan dan kinerja organisasi. Pemerintah diberi tanggung jawab oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan karena dianggap pemerintah lebih mampu dan siap. Kontrak hubungan yang terjadi antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat (*principal*) yakni atas dasar kepercayaan. Transparansi dalam pemerintah daerah diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, penyampaian informasi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi juga berfungsi untuk mengurangi persepsi negatif terhadap pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) dan Sufiati *et al.* (2022) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka didapatkan kesimpulan hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H₂: Transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.

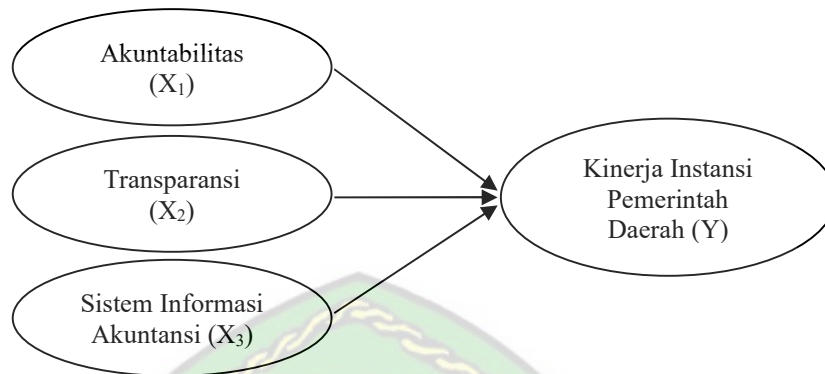
2.4.3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Menurut teori *stewardship*, pemerintah berlaku sebagai pelayan masyarakat (*steward*) yang secara intrinsik berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan publik. *Steward* disini adalah pegawai pemerintah yang dipercaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan loyalitas tinggi terhadap organisasi dan masyarakat. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang andal, para *steward* memiliki alat yang memadai termasuk teknologi informasi akuntansi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal. Serta mendukung peran *steward* dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program kerja pemerintah. Data yang akurat dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Efektivitas organisasi pemerintah daerah tidak diragukan lagi meningkat karena hal ini. Menurut (Azizah & Hidayat, 2023), kinerja organisasi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem informasi akuntansi. Sebagai hasilnya, teori ketiga, yaitu:

H₃: Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.

2.5. Model Penelitian

Berikut model penelitian yang dibuat berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah disebutkan diatas yaitu:



Gambar 2.2. Model Penelitian

Sumber: Data Olahan, 2025



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan hipotesis yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka setiap variabel memiliki definisi operasional sebagai berikut:

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja instansi pemerintah daerah. Kinerja instansi pemerintah daerah menjadi gambaran utama untuk menentukan nilai kualitas suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran variabel kinerja instansi pemerintah daerah ini menggunakan beberapa indikator yang telah dikembangkan sebelumnya oleh (Ula, 2018) sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja
2. Evaluasi kinerja
3. Pencapaian kinerja

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya, serta untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Variabel akuntabilitas diukur menggunakan sejumlah indikator yang sebelumnya dibuat oleh (Pertiwi, 2023) yaitu:

- a) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan.
- b) Keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.
- c) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik.
- d) Kesesuaian penyajian dengan standar.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dimana informasi yang relevan dikomunikasikan kepada publik, pihak-pihak yang berkepentingan harus dapat memperoleh informasi ini, dan informasi tersebut harus cukup untuk pemantauan dan pemahaman. Variabel transparansi diukur menggunakan sejumlah indikator yang sebelumnya dibuat oleh (Zahra *et al.*, 2023) yaitu:

- a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat proses yang dibuat untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, memproses, dan menampilkan data keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Variabel sistem informasi akuntansi dinilai menggunakan sejumlah indikator yang sebelumnya telah dibuat oleh (Dini, 2020) sebagai berikut:

- a) Keefektifan
- b) Kemudahan penggunaan
- c) Keakuratan
- d) Tepat waktu

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
1	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	a) Pengukuran kinerja	Instansi tempat saya bekerja memiliki pengukuran atas indikator kinerja yang sudah ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.
		b) Evaluasi kinerja	Instansi tempat saya bekerja melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.
		c) Pencapaian kinerja	Instansi tempat saya bekerja mampu mencapai target <i>outcome</i> pemerintah daerah.
2	Akuntabilitas (X1)	a) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan.	Instansi tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap program kegiatan.
		b) Keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	Instansi tempat saya bekerja menyadari adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.
		c) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik.	Instansi tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien.
		d) Kesesuaian penyajian dengan standar.	Instansi tempat saya bekerja menyajikan pencatatan keuangan yang sesuai dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Disambung ke halaman berikutnya

30

Tabel 3.1. Sambungan

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan
3	Transparansi (X2)	a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.	Instansi tempat saya bekerja menyadari atas kewajiban untuk memberikan informasi yang terbuka, menyeluruh, dan jujur kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan sumber daya yang diberikan.
		b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.	Instansi tempat saya bekerja menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya.
		c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.	Instansi tempat saya bekerja melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun yang dilaksanakan dengan tepat waktu.
		d) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.	Instansi tempat saya bekerja melakukan proses dan pertanggungjawaban dalam pemberian informasi yang diawasi secara terus menerus.
4	Sistem Informasi Akuntansi (X3)	a) Keefektifan	Instansi tempat saya bekerja menggunakan sistem informasi akuntansi yang memudahkan pengumpulan data keuangan menjadi lebih efektif.
		b) Kemudahan penggunaan	Instansi tempat saya bekerja menggunakan sistem informasi akuntansi yang dapat mempercepat pencatatan keuangan.
		c) Keakuratan	Instansi tempat saya bekerja menggunakan sistem informasi yang mempermudah penggunaannya dalam mengolah informasi keuangan.
		d) Tepat waktu	Instansi tempat saya bekerja menyajikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.

Sumber: Data Olahan, 2025

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel ditentukan secara khusus oleh peneliti dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pegawai yang bekerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser. Kriteria sampel yang dipilih tersebut merupakan instansi yang berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan APBD secara keseluruhan. Bapenda berperan dalam mengoptimalkan sisi pendapatannya, sedangkan BKAD berperan dalam pengelolaan keuangan secara umum termasuk pendapatan, belanja, dan aset. Masing-masing instansi tersebut memiliki jumlah pegawai sebanyak 71 orang di BKAD Kabupaten Paser dan 80 orang di Bapenda Kabupaten Paser. Sehingga pengambilan sampel dengan kriteria tertentu seluruhnya berjumlah 151 responden.

3.3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini didasari oleh ideologi positivis, yaitu metode yang mengumpulkan data dari kelompok populasi atau sampel tertentu untuk menguji hipotesis. Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumbernya, tanpa melalui pihak ketiga. Data yang digunakan berasal dari jawaban responden dalam kuesioner.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden berisi pertanyaan atau pernyataan tertulis terkait tentang variabel penelitian untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan skala likert 4 poin atau genap untuk menghindari “*Central Tendency Bias*” yang dapat terjadi pada skala likert ganjil, seperti 5 poin yang memberikan jawaban ragu-ragu pada pilihan tengah, sehingga menghasilkan jawaban yang tidak akurat.

3.5. *Pilot Test*

Pilot test adalah uji coba awal kuesioner yang dilakukan pada sampel kecil untuk mengetahui kuesioner tersebut efektif, jelas, dan dapat dipahami oleh responden. *Pilot test* bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul saat pengisian kuesioner, sehingga peneliti dapat memperbaiki kuesioner tersebut sebelum digunakan dalam penelitian utama yang lebih besar. Responden yang diperlukan dalam *pilot test* ini sebanyak 30 responden yang terdiri dari mahasiswa akuntansi yang menempuh studi peminatan akuntansi sektor publik.

1. Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Berikut adalah kriteria acuan nilai yang digunakan untuk pengujian validitas konvergen yaitu:

- Nilai *outer loading* atau *outer loading* $> 0,7$ maka dikatakan valid.
- Nilai *Average Variance Extrated* (AVE) $> 0,5$ maka dikatakan valid.

Tabel 3.2. Uji Validitas Konvergen (*Outer Loadings & AVE*)

	Indikator	Akuntabilitas (X1)	Transparansi (X2)	SIA (X3)	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)
<i>Outer Loadings</i>	1	0,960	0,868	0,824	0,963
	2	0,960	0,933	0,929	0,961
	3	0,947	0,913	0,878	0,968
	4	0,946	0,880	0,933	
AVE		0,909	0,808	0,796	0,929

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Hasil dari tabel 3.2. menunjukkan nilai *outer loading* pada masing-masing indikator penelitian menghasilkan nilai lebih dari 0,7 yang berarti validitas kuat dan konstruk dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini baik untuk digunakan dan memenuhi syarat validitas. Nilai AVE pada

masing-masing variabel juga menunjukkan hasil lebih dari 0,5 maka variabel dinyatakan valid dan memenuhi syarat.

2. Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan adalah uji untuk mengetahui seberapa besar suatu konstruk berbeda dari konstruk lainnya. Pengujian ini dapat dengan melihat nilai HTMT (*Heterotrait-Monotrait Ratio*). Nilai HTMT yang digunakan sebagai patokan adalah kurang dari 0,85, yang berarti validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Diskriminan – HTMT

	Akuntabilitas	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Sistem Informasi Akuntansi	Transparansi
Akuntabilitas	-	0,632	0,657	0,829
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,632	-	0,740	0,655
Sistem Informasi Akuntansi	0,657	0,740	-	0,736
Transparansi	0,829	0,655	0,736	-

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Berdasarkan tabel 3.3. menunjukkan hasil bahwa semua nilai HTMT kurang dari 0,85. Artinya, setiap konstruk dalam model memiliki validitas diskriminan yang baik, sehingga masing-masing konstruk memang berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

3. Uji Reliabilitas

Berikut adalah kriteria acuan nilai yang digunakan untuk pengujian reliabilitas yaitu:

- a) Nilai *cronbach's alpha* > 0,7 maka dikatakan reliabel.

b) Nilai *composite reliability* > 0,7 maka dikatakan reliabel.

Tabel 3.4. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (<i>rho a</i>)	Composite Reliability (<i>rho c</i>)
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,962	0,964	0,975
Akuntabilitas	0,967	0,983	0,976
Transparansi	0,922	0,941	0,944
Sistem Informasi Akuntansi	0,914	0,915	0,940

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Menurut tabel 3.4. semua variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,7. Nilai *composite reliability (rho_a)* dan *composite reliability (rho_c)* seluruhnya juga menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Dengan demikian, *output* yang dihasilkan untuk seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki hasil yang konsisten dan telah melampaui dari batas minimum yaitu 0,7.

3.6. Alat Analisis

Agar menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya, analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkategorikan data berdasarkan variabel, menabulasikan data, dan menyajikan data untuk perhitungan. Analisis variabel memproses dan mengelola data menggunakan alat analisis sistem statistik dengan menggunakan program SmartPLS versi 4.0.

3.6.1. Statistik Deskriptif

Proses mengumpulkan, mengkategorikan, dan mengevaluasi data numerik yang dianalisis menggunakan data sampel atau populasi untuk memperoleh informasi tertentu dikenal sebagai statistik deskriptif. Dengan menggunakan ukuran seperti rata-rata, deviasi standar, nilai terendah, dan nilai maksimum, statistik

deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau ringkasan mengenai keadaan setiap variabel. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah analisis dengan memberikan informasi tentang kumpulan data yang sebelumnya sulit dipahami.

3.6.2. Metode *Partial Least Square* (PLS)

Alat statistik multivariat untuk menganalisis model persamaan struktural berdasarkan varians atau komponen (SEM) adalah metode *Partial Least Squares* (PLS). PLS merupakan pengganti SEM berbasis kovarians, yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan banyak asumsi. Metode ini sangat berguna untuk memodelkan hubungan kompleks antara variabel laten dan memprediksi pengaruhnya. Model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) adalah dua sub model dalam tahapan analisis data SEM-PLS.

3.6.3. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran adalah analisis model yang menjelaskan hubungan antara setiap indikator dengan variabel latennya. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan menggunakan model ini.

1. Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Salah satu uji yang digunakan untuk menilai validitas hubungan antar konstruk adalah uji validitas konvergen. Nilai *factor loading* setiap indikator konstruk harus melebihi 0,7, dan jika nilai AVE melebihi 0,5, variabel dianggap dapat diterima.

2. Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan bertujuan untuk menilai seberapa besar satu konstruk berbeda dari yang lain. Angka HTMT (*Heterotrait-Monotrait Ratio*)

menunjukkan uji ini. Validitas diskriminan terpenuhi karena nilai referensi HTMT kurang dari 0,85.

3. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah suatu penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan dan menjamin bahwa ide perangkat pengukuran menghasilkan data yang konsisten, tepat, dan tepat waktu. Nilai reliabilitas komposit dan koefisien *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur pengujian ini. Baik nilai *composite reliability* maupun nilai *Cronbach's Alpha* melebihi dari 0,7, maka data tersebut reliabel.

3.6.4. Model Struktural (*Inner Model*)

Sebuah analisis model untuk mengkaji hubungan antara variabel bebas dan terikat disebut model struktural, yang sering dikenal sebagai model internal. Model internal bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar konstruk sesuai dengan hipotesis studi yang telah dikembangkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa prosedur untuk mengevaluasi model struktural:

1. *R-Square*

R-Square merupakan uji yang digunakan untuk mengevaluasi proporsi konstruk yang dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dari nilai *R-Square* yaitu:

- a) Nilai *R-Square* $\geq 0,75$ menunjukkan bahwa model penelitian tersebut adalah kuat atau substansial.
- b) Nilai *R-Square* $\geq 0,50$ menunjukkan bahwa model penelitian tersebut adalah sedang atau moderat.

- c) Nilai $R\text{-Square} \geq 0,25$ menunjukkan bahwa model penelitian tersebut adalah kecil atau lemah.

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah diterima atau tidaknya suatu hipotesis pada penelitian ini. Pengujian hipotesis diukur berdasarkan hasil perhitungan *path coefficient*. *Path coefficient* adalah pengujian untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel dengan melalui prosedur metode *bootstrapping* pada software SmartPLS versi 4.0. Uji *path coefficient* ini dilakukan untuk melihat arah dan kekuatan pengaruh dari variabel laten. Standar acuan untuk membandingkan nilai P dengan nilai koefisien jalur adalah sebagai berikut:

- a) Apabila koefisien jalur menunjukkan angka positif, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat sejalan. Ketika ada peningkatan pada variabel independen, variabel dependen juga akan mengalami kenaikan.
- b) Apabila koefisien jalur menunjukkan angka negatif, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat berlawanan. Ketika variabel independen mengalami peningkatan, variabel dependen akan mengalami penurunan.
- c) Nilai signifikansi atau probabilitas (*P-Values*):
- Apabila nilai $P\text{-Values} \leq 0,05$ maka dianggap signifikan.
 - Apabila nilai $P\text{-Values} > 0,05$ maka dianggap tidak signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser dan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser. Semua 71 pegawai di Kantor BKAD Kabupaten Paser dan 80 pegawai di Kantor Bapenda Kabupaten Paser diberikan kuesioner dengan pernyataan untuk diisi. Sehingga terdapat 151 responden dalam seluruh sampel. Kuesioner dibagikan selama sekitar dua minggu, dari 11 Agustus hingga 22 Agustus 2025. Berikut adalah rincian distribusi survei:

Tabel 4.1. Rincian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner dibagikan	151	100%
Kuesioner tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang kembali dan digunakan sebagai sampel	151	100%

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan rincian kuesioner yang disajikan pada tabel 4.1. peneliti membagikan 151 kuesioner kepada 2 kantor OPD di Kabupaten Paser yaitu BKAD Kabupaten Paser dan Bapenda Kabupaten Paser. Peneliti membagikan kuesioner dengan cara mengantarkan langsung ke Kantor BKAD Kabupaten Paser dan Bapenda Kabupaten Paser. Kemudian setelah diisi peneliti mengambilnya kembali pada 2 kantor OPD tersebut. Dari 151 kuesioner yang dibagikan, seluruhnya telah kembali kepada peneliti yaitu sebesar 100%. Maka kuesioner yang digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 151 kuesioner.

4.2. Karakteristik Responden

Gambaran secara umum dari semua responden yang telah menyelesaikan kuesioner ditentukan oleh karakteristik responden. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat-sifat responden, yang telah dikategorikan menurut jabatan dan jenis kelamin:

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menjadi salah satu unsur penting dalam penentuan perekrutan pegawai untuk menduduki suatu jabatan yang tersedia (Ariatin, 2021). Karakteristik dari para responden berdasarkan jenis kelaminnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Laki-Laki	79	52%
2	Perempuan	72	48%
Total		151	100%

Sumber: Data Olahan, 2025

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 79 karyawan laki-laki, atau 52% dari total, dan 72 karyawan perempuan, atau 48% dari total. Terlihat bahwa karyawan laki-laki lebih dominan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pria umumnya lebih produktif dibandingkan wanita dan dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga mereka (Fikri, 2022).

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan menjadi salah satu peran penting dalam pengelompokan responden untuk menggambarkan posisi atau kedudukan formal yang mereka miliki dalam struktur organisasi. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jabatan:

Tabel 4.3. Jabatan Responden

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Kepala Badan	2	1%
2	Sekretaris	2	1%
3	Kepala Bidang	8	6%
4	Kepala Sub Bidang	16	11%
5	Kepala Sub Bagian	2	1%
6	Staff	121	80%
Total		151	100%

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui mayoritas responden 121 orang atau sebesar 80% bekerja dengan jabatan staf. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data diperoleh dari pegawai yang terlibat langsung dalam aktivitas teknis dan operasional instansi. Responden dengan jabatan kepala badan, sekretaris, dan kepala sub bagian masing-masing sebanyak 2 orang (1%), kepala bidang sebanyak 8 orang (6%), dan kepala sub bidang sebanyak 16 orang (11%).

4.3. Hasil Analisis Data

Hasil analisis data diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pegawai BKAD Kabupaten Paser dan Bapenda Kabupaten Paser sebagai responden. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi agar menjadi masukan bagi instansi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerjanya.

4.3.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran lengkap terkait variabel-variabel dalam penelitian secara statistik yang meliputi rata-rata (*mean*), nilai terkecil, nilai terbesar, dan standar deviasi. Analisis deskriptif ini menyajikan variabel kinerja instansi pemerintah daerah, akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi. Pengujian ini dilakukan terhadap 151 sampel responden.

Tabel 4.4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Standard Deviation
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	151	9,636	6,000	12,000	1,857
Akuntabilitas	151	13,417	10,000	16,000	1,968
Transparansi	151	13,503	10,000	16,000	2,032
Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	151	13,728	9,000	16,000	1,823

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Menurut hasil perhitungan diatas pada tabel 4.4. memberikan hasil sebagai berikut:

a. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan 151 data sampel, variabel kinerja instansi pemerintah daerah menghasilkan nilai terkecil sebesar 6,000 dan nilai terbesar 12,000. Data ini cukup beragam dan tersebar luas, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 9,636 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1,857.

b. Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas dengan 151 data sampel menghasilkan nilai terkecil sebesar 10,000 dan nilai terbesar 16,000. Data terdistribusi dengan baik dan cukup beragam, ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 13,417 yang menunjukkan hasil melebihi nilai standar deviasi sebesar 1,968.

c. Transparansi

Variabel transparansi dengan 151 data sampel menghasilkan nilai terkecil sebesar 10,000 dan nilai terbesar 16,000. Nilai *mean* sebesar 13,503 menunjukkan hasil lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 2,032 yang artinya data tersebar dengan baik dan cukup beragam.

d. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Variabel SIA dengan 151 data sampel menghasilkan nilai terkecil sebesar 9,000 dan nilai terbesar 16,000. Data ini cukup beragam dan tersebar dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai *mean* sebesar 13,728 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1,823.

4.3.2. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis model yang menunjukkan hubungan antara setiap variabel laten dan indikator disebut sebagai model pengukuran. Model ini digunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Dua kriteria digunakan untuk mengevaluasi pengujian validitas konvergen. Kriteria pertama nilai *outer loading* harus $> 0,7$. Kriteria kedua adalah nilai AVE harus $> 0,5$. Variabel dianggap sah jika hasil yang dihasilkan melampaui nilai-nilai tersebut.

Tabel 4.5. Uji Validitas Konvergen (*Outer Loadings & AVE*)

	Indikator	Akuntabilitas (X1)	Transparansi (X2)	SIA (X3)	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)
Outer Loadings	1	0,885	0,889	0,705	0,927
	2	0,862	0,895	0,861	0,931
	3	0,716	0,795	0,844	0,900
	4	0,859	0,745	0,760	
AVE		0,694	0,695	0,632	0,845

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Hasil dari tabel 4.5. terlihat bahwa nilai *outer loading* pada masing-masing indikator penelitian memiliki nilai lebih dari 0,7 yang menunjukkan validitas kuat dan konstruk dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dalam

penelitian ini baik untuk digunakan dan memenuhi syarat validitas. Nilai AVE setiap variabel juga menunjukkan hasil melebihi 0,5 menunjukkan variabel dianggap sah dan memenuhi syarat.

2. Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan dilihat berdasarkan nilai HTMT (*Heterotrait-Monotrait Ratio*). Acuan nilai HTMT yaitu $< 0,85$ yang berarti menunjukkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi.

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Diskriminan - HTMT

	Akuntabilitas	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Sistem Informasi Akuntansi	Transparansi
Akuntabilitas	-	0,607	0,700	0,725
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,607	-	0,673	0,630
Sistem Informasi Akuntansi	0,700	0,673	-	0,728
Transparansi	0,725	0,630	0,728	-

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Tabel 4.6. menunjukkan hasil bahwa semua nilai HTMT kurang dari 0,85. Artinya, setiap konstruk dalam model memiliki validitas diskriminan yang baik, sehingga masing-masing konstruk memang berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan melihat nilai koefisien *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability*. Suatu data dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability* menunjukkan hasil $> 0,7$.

Tabel 4.7. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (ρ_a)	Composite Reliability (ρ_c)
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,908	0,909	0,942
Akuntabilitas	0,855	0,890	0,900
Transparansi	0,853	0,870	0,900
Sistem Informasi Akuntansi	0,803	0,808	0,872

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Berdasarkan tabel 4.7. menunjukkan bahwa semua variabel penelitian menghasilkan nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$. Nilai *composite reliability* (ρ_a) dan *composite reliability* (ρ_c) seluruhnya juga menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Dengan demikian, *output* yang dihasilkan dapat diartikan untuk semua variabel adalah reliabel karena memiliki hasil yang konsisten dan telah melampaui dari batas minimum yaitu 0,7.

4.3.3. Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model untuk mengkaji hubungan antara variabel bebas dan terikat disebut model struktural. Pada model ini dilakukan untuk mengetahui nilai *R-Square* dan nilai *path coefficient*.

1. *R-Square*

R-Square berfungsi untuk mengevaluasi proporsi konstruk yang dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dari nilai *R-Square* yaitu:

- Nilai *R-Square* $\geq 0,75$ menunjukkan bahwa model penelitian tersebut adalah kuat atau substansial.
- Nilai *R-Square* $\geq 0,50$ menunjukkan bahwa model penelitian tersebut adalah sedang atau moderat.

- c) Nilai $R\text{-Square} \geq 0,25$ menunjukkan bahwa model penelitian tersebut adalah kecil atau lemah.

Tabel 4.8. *R-Square*

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,437	0,426

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Keterbatasan dari Nilai $R\text{-Square}$ adalah bahwa nilainya akan selalu meningkat jika variabel bebas dimasukkan, meskipun variabel tersebut tidak relevan atau signifikan terhadap variabel dependen. Maka penulis memilih menggunakan nilai *R-Square Adjusted* karena lebih akurat dan telah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model. Sesuai pada tabel 4.8. diketahui nilai *R-Square Adjusted* 0,426. Angka 42,6% tersebut mengartikan kinerja instansi pemerintah daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi lemah. Namun 57,4% dari kinerja instansi pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

Tujuan uji hipotesis adalah agar mengetahui apakah diterima atau tidaknya suatu hipotesis pada penelitian ini. Pengujian hipotesis diukur berdasarkan hasil perhitungan *path coefficient*. Uji *path coefficient* ini dilakukan untuk melihat arah dan kekuatan pengaruh dari variabel laten. Kriteria acuan nilai *P-Values* pada nilai *path coefficient* adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen searah jika nilai koefisiennya positif. Variabel dependen meningkat ketika nilai variabel independen meningkat.

- b. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berlawanan jika nilai koefisiennya negatif. Variabel dependen menurun ketika nilai variabel independen meningkat.
- c. Nilai signifikansi atau probabilitas (*P-Values*):
- Apabila nilai *P-Values* $\leq 0,05$ maka dianggap signifikan.
 - Apabila nilai *P-Values* $> 0,05$ maka dianggap tidak signifikan.

Tabel 4.9. Path Coefficient

Variabel	Coefficients	T Statistics	P Values
Akuntabilitas (X1)	0,228	2,268	0,012
Transparansi (X2)	0,239	2,150	0,000
SIA (X3)	0,304	3,388	0,016

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

Berdasarkan analisis hipotesis yang telah dipresentasikan dalam tabel 4.9, diperoleh hasil dari variabel akuntabilitas menunjukkan koefisien sebesar 0,228 yang mengindikasikan arah positif dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,012, sedangkan nilai T Statistik diatas 1,96 yaitu 2,268. Hal ini berarti akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Maka, hipotesis pertama dapat diterima.

Variabel transparansi memiliki koefisien sebesar 0,239 yang juga menunjukkan arah positif dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yakni 0,000 dan nilai T Statistik diatas 1,96 yaitu 2,150. Hal ini berarti transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Variabel SIA memiliki nilai koefisien sebesar 0,304 yang menunjukkan arah positif dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,016 dan nilai T Statistik diatas 1,96 yaitu sebesar 3,388. Hal ini berarti SIA memiliki pengaruh yang

signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan uji hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan *software* SmartPLS versi 4.0 maka diperoleh hasil yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.10. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Arah	Keterangan
H1	Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.	Positif	Diterima
H2	Transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.	Positif	Diterima
H3	Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser.	Positif	Diterima

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4, 2025

4.4.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Temuan dari pengujian hipotesis pertama menjelaskan bahwa akuntabilitas secara signifikan dan positif mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah daerah Kabupaten Paser akan berkinerja lebih baik secara finansial dan semakin tinggi akuntabilitas yang mereka berikan dalam menangani dan melaporkan masalah keuangan.

Menurut hasil pengujian data yang tersaji pada tabel 4.5. menunjukkan nilai indikator paling dominan dalam mengukur variabel akuntabilitas yaitu berada pada indikator yang pertama sebesar 0,885 yaitu mengenai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan program kegiatan. Artinya setiap instansi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap program kegiatannya yang telah terlaksana, sehingga seluruh pihak bisa menilai kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian akuntabilitas mempengaruhi kinerja pemerintah dalam proses pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan adanya hubungan yang erat antara *steward* dan *principal*, yaitu pemerintah (*steward*) sebagai pengelola sumber daya bertanggung jawab terhadap kepentingan publik dan organisasi, bukan hanya kepentingan pribadi milik sendiri. Salah satu syarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan adalah mempertanggungjawabkan kinerja dengan akuntabilitas yang baik, dan terukur serta memperhatikan kepentingan pengelola dan pemangku kepentingan (Badele & Fundeanu, 2014). Dengan adanya akuntabilitas keuangan, membuat masyarakat semakin terdorong untuk memberikan dananya berupa pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dan kemudian dikelola dalam rangka perwujudan pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Hal itu tentu dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Paser terhadap dana transfer pusat dan dapat mencapai target-target pelayanan demi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahmadani & Narastri, 2024; Azizah & Hidayat, 2023; Haris *et al.*, 2022; Sufiati *et al.*, 2022) menunjukkan temuan bahwa akuntabilitas secara signifikan dan positif memengaruhi kinerja lembaga pemerintahan daerah. Berdasarkan temuan

ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan berkinerja lebih baik dalam memenuhi kewajibannya jika menyediakan sistem akuntabilitas yang lebih kuat bagi publik.

4.4.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Hasil pengujian hipotesis kedua menjelaskan transparansi mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser secara signifikan dan positif. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik penerapan transparansi oleh instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser dalam keterbukaan penyampaian informasi keuangan dan kemudahan dalam mengakses informasi, maka akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan yang lebih baik pula di instansi tersebut.

Menurut hasil pengujian data pada tabel 4.5. menunjukkan nilai indikator paling dominan dalam mengukur variabel transparansi yaitu berada pada indikator yang kedua sebesar 0,895 yaitu mengenai tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses. Artinya setiap instansi mampu memfasilitasi informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat maupun pengguna informasi lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa transparansi mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat (*principal*) yakni atas dasar kepercayaan. Dengan adanya transparansi ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Paser karena masyarakat menjadi lebih mengetahui informasi terkait penggunaan dana publik. Selain itu, transparansi dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mendorong

masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah lebih disiplin guna mendukung anggaran lokal Kabupaten Paser.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahmadani & Narastri, 2024; Sufiati *et al.*, 2022; Jitmau *et al.*, 2017) ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga pemerintahan daerah secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam administrasi lokal berfungsi untuk mengurangi opini negatif terhadap pemerintah. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, penyebaran informasi kebijakan, dan penerbitan laporan keuangan adalah beberapa cara untuk mencapai transparansi.

4.4.3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser secara signifikan dan positif. Hal tersebut menandakan bahwa semakin bagus dan andal sistem informasi akuntansi yang digunakan suatu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi mengenai aspek keuangan, maka akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan yang lebih baik pula di instansi tersebut.

Menurut hasil pengujian data yang terlihat di tabel 4.5. menerangkan nilai indikator paling dominan dalam mengukur variabel sistem informasi akuntansi yaitu berada pada indikator yang kedua sebesar 0,861 yaitu mengenai kemudahan dalam penggunaan sistem informasi. Artinya setiap instansi yang menggunakan

sistem informasi akuntansi dapat mempermudah dan mempercepat proses pencatatan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa pemerintah berlaku sebagai pelayan masyarakat (*steward*) yang secara intrinsik berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan publik. Selain mendukung peran pemerintah dalam menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat, sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan memungkinkan anggota staf di instansi pemerintah daerah untuk menjalankan tugas mereka seefektif mungkin. Hal ini memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kerja di pemerintah daerah Kabupaten Paser. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dan masyarakat didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah guna memaksimalkan pendapatan daerah ketika informasi keuangan yang akurat tersedia untuk publik. Dengan cara ini, kesejahteraan masyarakat dan layanan publik dapat diberikan tanpa terlalu mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azizah & Hidayat, 2023; Zahro, 2016) menunjukkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi secara signifikan dan positif mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan temuan ini dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah karena ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat dapat mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal itu dapat terjadi karena melalui sistem informasi akuntansi

mampu meningkatkan kinerja pegawainya dan tentunya juga akan berdampak pada peningkatan kinerja di instansi pemerintah daerah tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kinerja instansi pemerintah daerah telah dianalisis pada bab sebelumnya, dan berikut kesimpulan yang dicapai:

1. Kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh akuntabilitas. Sebagai hasilnya, hipotesis awal disetujui. Ini menjelaskan bahwa kinerja keuangan instansi pemerintah daerah akan lebih baik, dengan semakin tinggi akuntabilitas yang mereka tawarkan dalam menangani dan melaporkan keuangannya.
2. Transparansi mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser. Sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hal ini mengartikan bahwa semakin baik penerapan transparansi oleh instansi pemerintah daerah dalam keterbukaan penyampaian informasi keuangan dan kemudahan dalam mengakses informasi, maka akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan yang lebih baik pula di instansi tersebut dan mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah.
3. Sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser secara signifikan dan positif. Sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus dan andal sistem informasi akuntansi yang digunakan suatu instansi pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan

informasi mengenai aspek keuangan, maka akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan yang lebih baik pula di instansi tersebut melalui kinerja pegawai dalam mengelola dan menyampaikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.

5.2. Saran

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan luaran atau *output* yang lebih baik dan berguna serta sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi di instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih kurang optimal. Instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerahnya agar kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik dan optimal, terutama pada pendapatan asli daerahnya. Serta dapat menjadi bahan evaluasi berkala terhadap kinerja pegawainya.
2. Pada peneliti selanjutnya bisa ditambahkan variabel lain selain akuntabilitas, transparansi, dan sistem informasi akuntansi. Selain itu, peneliti selanjutnya bisa memperluas sampel yang lebih bervariasi agar dapat melihat hasil dalam konteks yang lebih luas dan spesifik.